



Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah 2026: Perkuat Kapasitas Pimpinan Daerah untuk Fiskal yang Sehat dan Berdampak

Jakarta, 11 Februari 2026 — Kementerian Keuangan, melalui kolaborasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), menyelenggarakan Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2026 pada 11–12 Februari 2026 di Pusdiklat Pajak, Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pimpinan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal daerah yang sehat, berkualitas, dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPPK Sudarto mengungkapkan meski workshop bagi level pimpinan ini pernah diadakan pada tahun 2024, kegiatan tersebut kembali diselenggarakan dengan harapan menjadi pengingat mengenai tata kelola keuangan daerah yang perlu dijaga, kerjasama antar pusat dan daerah, serta mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan lebih baik. Beliau juga menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada masyarakat. “Top pimpinan sangat mempengaruhi *human capital* di unitnya masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Halilul Khairi menyebutkan bahwa tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah masih sedikitnya daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Penyebab persoalan tersebut bukan semata karena keterbatasan anggaran tetapi juga efektivitas penggunaannya. Kemudian tantangan lainnya terkait isu tata kelola, manajemen, manajemen finansial, dan fiskal. Bukan sekedar persoalan administrasi, tetapi masih adanya anggapan bahwa APBN merupakan tulang punggung ekonomi. Padahal APBD seharusnya menjadi *leverage* pertumbuhan ekonomi. Maka melalui workshop ini diharapkan dapat mengubah cara daerah memandang dan mengalokasikan anggaran untuk menjadi pemicu efisiensi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Workshop ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung agenda nasional, termasuk harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Perekonomian daerah dipandang sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya saldo kas daerah yang belum produktif (*idle cash*), kualitas belanja yang belum optimal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum maksimal, keterbatasan akses pembiayaan daerah, hingga penguatan sistem pengendalian internal. Workshop ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut secara terintegrasi.

Narahubung Media: _____

Arfiansyah Darwin
Kepala Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan



Peserta workshop merupakan Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, aset, dan investasi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber lintas kementerian dan lembaga, antara lain dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Materi workshop mencakup isu-isu strategis seperti integrasi perencanaan dan penganggaran, peran belanja daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, percepatan realisasi belanja dan manajemen kas daerah, penggalan potensi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, strategi pembiayaan dan investasi termasuk KPBU, serta penguatan integritas dan sistem pengendalian internal.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi pascapelatihan yang dilaksanakan dalam rentang 3–6 bulan melalui pendampingan, *coaching*, dan *mentoring* oleh unit pusat dan unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Pemerintah Daerah yang menunjukkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah berpeluang dipertimbangkan untuk memperoleh Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui workshop ini, Kementerian Keuangan berharap pengelolaan fiskal daerah semakin berkualitas, berintegritas, dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Narahubung Media: _____

Arfiansyah Darwin
Kepala Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan



081310004134

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id